

RINGKASAN

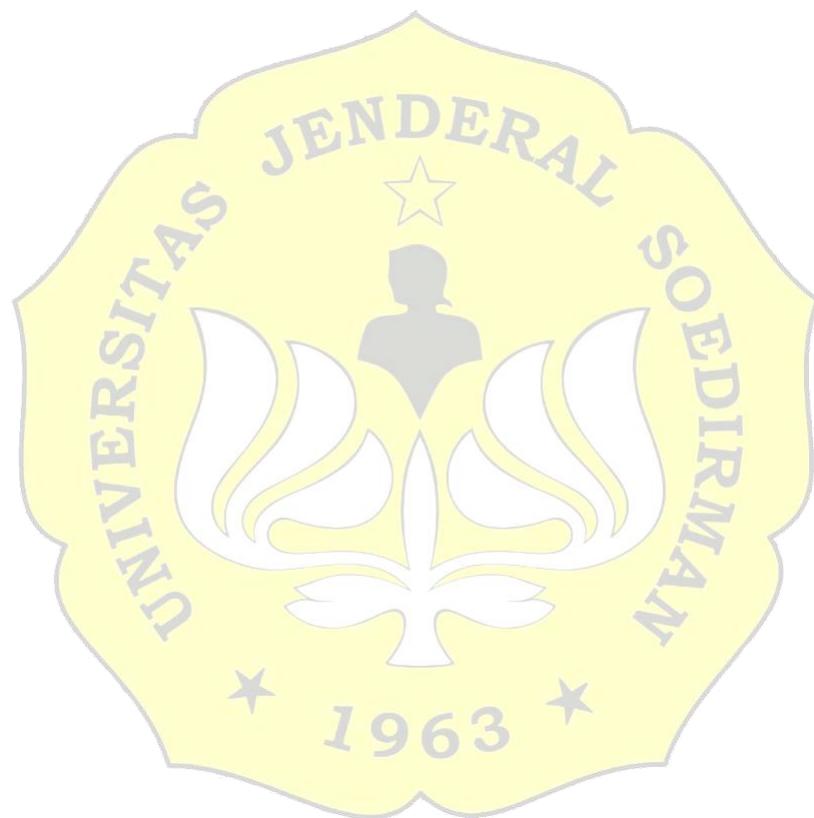
Penelitian ini berjudul Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjadikan desa dapat mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang baik, Desa Karangtengah merupakan desa yang memperoleh dana desa paling tinggi diantara desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Baturraden. Peran besar yang diterima oleh pemerintah desa tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar juga sehingga pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahannya sebagaimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas dari Koppell dimana terdapat lima dimensi untuk melihat akuntabilitas pengelolaan dana desa diantaranya *transparency, liability, controllability, responsibility, and responsiveness*. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif sedangkan untuk teknik pemilihan informannya menggunakan *purposive sampling* pemilihan informan yang benar-benar mengerti tentang informasi objek penelitian dan informan dapat dipercaya sebagai sumber data yang berkompeten. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Dalam menjamin keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi sumber menggunakan model analisis interaktif Milles, Huberman dan Saldana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di desa Karangtengah sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari aspek *transparency*, pemerintah desa karangtengah sudah terbuka sehingga masyarakat atau *stakeholders* dapat mengakses dengan mudah melalui infografik APBDes desa yang dipasang di depan balai desa. Kemudian aspek *liability*, penggunaan dana desa sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya aspek *controllability*, pengawasan dari pihak internal dan eksternal dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir penyelewengan penggunaan dana desa. selajutnya aspek *responsibility*, aparatur pemerintah desa Karangtengah harus

memahami dan patuh pada aturan yang sudah ditetapkan dalam pengelolaan dana desanya. Dan yang terakhir yaitu aspek *responsiveness*, pemerintah Desa Karangtengah cepat tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Pemerintah Desa, Pengelolaan.



SUMARRY

This research is entitled Village Government Accountability in Village Fund Management in Karangtengah Village, Baturraden District, Banyumas Regency. With the passing of Law No. 6/2014 on Villages, the village can manage its own governance and equitable development implementation to improve the welfare and quality of life of rural communities. The Village Fund is a fund sourced from the State Revenue and Expenditure Budget allocated to villages which is transferred through the district / city Regional Income and Expenditure Budget and is used to finance the administration, governance, development and empowerment of the community and society. In the implementation of good accountability for village fund management, Karangtengah Village is the village that receives the highest village funds among other villages in Baturraden District. The big role that is accepted by the village government is of course accompanied by a big responsibility as well so that the village government must be able to apply the principle of accountability in its governance as all the end of activities in the implementation of village government must be accountable to the village community according to the provisions.

The purpose of this research is to find out how the accountability of the village government in managing village funds. This study uses Koppel accountability theory where are five dimensions to see the accountability of village fund management including transparency, liability, controllability, controllability, responsibility, and responsiveness. The method used is descriptive qualitative, while the informant selection technique uses purposive sampling, selecting informants who really understand the information on the object of research and the informants can be trusted as competent data sources. Collecting data through in-depth interviews, observation, and documentation. In ensuring the validity of the data used, the source triangulation technique uses the interactive analysis model of Milles, Huberman, and Saldana.

The results showed that the accountability of the village government in managing village funds in the village of Karangtengah has gone well. Judging from the transparency aspect, the Karangtengah village government has been open so that the community of stakeholders can easily access it through the village APBDes infographics posted in front of the village hall. Then in the liability aspect, the use of village funds is in accordance with existing regulations. Furthermore, the controllability

aspect, supervision from internal and external parties is carried out in accordance with applicable regulations to minimize misuse of village funds. Furthermore, the aspect of responsibility, Karangtengah village government officials must understand and obey the rules that have been set in the management of village funds. And the last is the responsiveness aspect, the Karangtengah village government is responsive to the aspirations of the community.

Keywords: Accountability, village fund, village government, management

